

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi:

- A.W.Widjaja, 2006, *Administraasi Kepegawaian*, Rajawali.
- Bambang PS Brodjonegoro, 2008, *Proses Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta.
- Juliantara, 2006, *Pengertiaa Desentralisasi*, Jakarta.
- Musanef, 1984, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Mukti Yulianto, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, cetakan 1, Pensil Komunika, Yogyakarta.
- Martoyo, 2000, *Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Prestasi Kerja, Lower dan Porter dalam Indra Wijaya*, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2012, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Jakarta.
- Mawardi, 2002, *Desentralisasi Pelayanan Publik di Indonesia*, Jakarta.
- Rondelli, McCullough & Jhonson, 1989, dikutip oleh Muluk, *Definisi Desentralisasi*, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1999, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sawandi, Made, 2001, *Agenda Kebijakan Reformasi Pemerintahan Daerah, Sebagai Tindak Lanjut Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999*, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Kinerja (performance), Bidang Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Tiebout, Litvack, 1998, *Tinjauan tentang Desentralisasi Terhadap Pelayanan Publik*, Jakarta.

Peraturan:

Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Peraturan Dasar

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintag Daerah

Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PP No. 38 Tahun 2007 pasal 6 ayat 2 tentang urusan pemerintah daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Penilaian Pelaksanaan